

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Rifai, 2020, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Anita Tri Widiyawati dan Romula Adiono, 2020, *Manajemen Koleksi: Collection Management*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Antonius Purwanto, 2021, *Sosiologi Industri dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Anwar, et al., 2021, *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*, Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, 2021, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Azmi Fendri, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Depok: Rajawali Pers.
- Baso Madihong, 2017, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Makassar: Celebes Media Perkasa.

Besse Marhawati, 2018, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish.

Bohari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Citra Kurnia Akbar dan Imam Hanafi, *Kebijakan Perijinan*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group.

Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kecana.

Hatta Ali, 2014, *Sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Edisi Revisi Cetakan V), Yogyakarta: Birra Buana Media.

Made Arya Utama, et al, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Pusaka Sutra.

Muh. Ramli dan Hardianti Pertiwi, 2023, *Pengantar Ekonomi Dan Bisnis, Pasaman Barat*: CV. Azka Pustaka.

Muhammad Busro, 2018, *Teori-teori manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: Prenada Media.

Mukhlis, et al., 2020, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Muslim Afandi dan Syed Agung Afandi, 2018, *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*, Palembang: Tunas Gemilang Press.

- Nikmatul Masruroh, et al., 2022, *Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Nurul Qamar dan farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: Social Politic Genius.
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: CV. Cendekia Press.
- Rindiana Larasati, 2023. *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris di Indonesia*, Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, *Deteksi Dini Amdal Dengan Early Warning System Berbasis Aplikasi*, Edisi Kedua, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Victorianus Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group Kencana.
- Zulkifli Aspan, 2021, *Amdal Izin Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Mega Cakrawala.

Skripsi

Agusrian Catur Saputra, 2021, *Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Perusahaan Industri Pengelolaan Kayu di Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Jurnal

Anhar Drakel, 2023, *Kajian Konservasi Lahan Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 5 No.1, Pendidikan Ekonomi Institut Sain dan Kependidikan.

Aris Rimawan dan Ufran, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara*. Jurnal Parhesia, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Azrina, 2017, *Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Syiah Kuala, Aceh.

Fitri Yanni Dewi Siregar, 2022, *Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Deli Serdang.

- Hasan Basri, 2020, *Pengelolaan, pengawasan kawasan pesisir dan laut di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh.
- Mahirun, 2023, *Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Bagi Pelaku Usaha Bidang Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekalongan*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3 Nomor 3, LP2M STP Mataram.
- Muhammad Zulfan Hakim, 2011, *Izin sebagai Instrumen Pengawasan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, *Jurnal Hukum Ishlah*, Volume 29, Fakultas Hukum UMI, Makassar.
- Sarwono, Pristi Yudyastanti, dan Marsito, 2021, *Hubungan Penggunaan Apd Masker Terhadap Risiko Gangguan Pernafasan Ispa Pada Pekerja Industri Pengolahan Kayu di Wadaslintang*, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, Volume 17 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Gombong, Kebumen.
- Sitti Nursabrina, Yunarti Yunarti, dan Asriany Asriany, 2022, *Analisis faktor faktor yang mempengaruhi produksi kayu lapis pada PT. Linggarjati Mahardika Mulia II (Unit Sambong)*, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Volume 2 Nomor 1, Politeknik PERNATIAN Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep.

Sukaji Sarbi, 2018, *Dampak Pembangunan Terhadap Hutan Dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kabupaten Polewali Mandar)*, Jurnal Bumi Lestari, Volume 18 Nomor 1, Universitas Al Asyariah Manda, Polewali Mandar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 tahun 2014 tentang izin usaha industri, izin perluasan dan Tanda daftar industri.

Sumber Internet

GAKKUM: Penegakan Hukum Lingkungan & Kehutanan. 2023. *Balai Gakkum LHK*. Diakses pada 4 Januari 2024, <https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/upt>.

Forestdigest, 2023. *Masa Depan Industri Kayu*. Diakses pada 13 Maret 2024, <https://www.forestdigest.com/detail/2156/industri-kayu>.

Sippn.menpan, 2022, *Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)*. Diakses pada 14 Februari 2024, <https://sippn.menpan.go.id/pelayananpublik/8169938/pemerintah-provinsi-gorontalo/izin-usaha-industri-primer-hasil-hutan-kayu-iuiphhk>.

Kilassulawesi, 2023, *KPH Mapilli Sita Kayu tak Bertuan*. Diakses pada 27 September 2024, <https://kilassulawesi.com/2023/11/kph-mapilli-sita-kayu-tak-bertuan/>

Kompaspedia, 2023, Provinsi Sulawesi Barat: Wilayah Mandar yang Kaya Potensi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Diakses Pada 28 September 2024 <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-sulawesi-barat-wilayah-mandar-yang-kaya-potensi-di-sektor-pertanian-kehutanan-dan-perikanan>